

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN ACEH BARAT

*ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON LABOR
ABSORBING IN WEST ACEH DISTRICT*

Alisman

Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the effect of economic growth and government spending on labor absorption in West Aceh district in the period 2005-2014. The analysis model used is multiple linear regression analysis. Based on the estimation result, there are constants of 5.718, the coefficient of economic growth regression (X2) is 428, and the government expenditure regression coefficient (X2) is 2,639. With the coefficient of determination (R adjustes) of 48.1 percent. This means that employment in West Aceh Regency is 48.1 percent influenced by economic growth and government spending and the remaining 51, 9 percent is explained by other variables outside of this model. suggestions put forward that local governments that have been working on their economic performance to encourage and spur economic growth, especially in all sectors that are able to absorb more labor such as agricultural sector and trade sector and local companies. And also need to seek in overcoming the problem of wages so as to improve the welfare of workers without sacrificing the interests of employers.

Keywords: The economic growth, The Spending of Government, The Labor Absorption

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada periode 2005-2014. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil estimasi, terdapat konstanta sebesar 5,718, koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (X2) adalah 428, dan koefisien regresi pengeluaran pemerintah (X2) adalah 2,639. Dengan koefisien determinasi (R adjustes) sebesar 48,1 persen. Ini berarti bahwa pekerjaan di Kabupaten Aceh Barat adalah 48,1 persen dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah dan sisanya 51, 9 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. saran dikemukakan bahwa pemerintah daerah yang telah bekerja pada kinerja ekonomi mereka untuk mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di semua sektor yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan dan perusahaan lokal. Dan juga perlu mencari dalam mengatasi masalah

upah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan kepentingan pengusaha.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari permintaan dan penawaran pertumbuhan penduduk juga membutuhkan penambahan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan meningkatkan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan penentasan kemiskinan (Tambunan, 2012:40).

Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia. Dengan perkataan lain, yang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada tenaga kerja. (Suparta, 2014).

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, menjadi subjek penting untuk dianalisis dan diperdebatkan. Kontroversi utama adalah sektor publik dapat menaikkan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi (*long run steady state growth economy* (Jamzani, 2007:27).

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan suatu faktor yang dapat mendorong terjadinya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat karena pembiayaan daerah salah satunya bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2014

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2005	0,16
2	2006	10,59
3	2007	9,13
4	2008	5,97

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
5	2009	5,43
6	2010	7,21
7	2011	5,18
8	2012	5,03
9	2013	5,22
10	2014	5,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2015

Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Barat terjadi peningkatan hingga tahun 2014. Di mana pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat sebesar 0,16 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan terendah di sepanjang tahun 2005-2014. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2005 disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kondisi keamanan dan terjadinya musibah bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di Kota Meulaboh yang merupakan pusat ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat meningkat drastis sebesar 10,59 persen. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan di berbagai sektor di Kabupaten Aceh Barat baik di sektor pertanian, sektor perdagangan dan sebagainya.

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan anggaran dari pemerintah kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pembangunan yang bersifat produktif seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pembangunan di sektor pertanian dan pembangunan di sektor perdagangan sehingga potensi ekonomi di Kabupaten Aceh Barat dapat dimaksimalkan secara efektif. Semua pembangunan ini tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Aceh Barat harus mengalokasikan sebagian dari pendapatan daerah untuk melakukan pengeluaran pembangunan. Adanya campur tangan pemerintah dalam pembangunan dapat dilihat dari seberapa besar pengeluaran pemerintah direalisasikan dalam pembangunan daerahnya. Perkembangan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2014

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rp)
1	2005	194.982.015.432
2	2006	303.421.501.494
3	2007	553.714.542.601
4	2008	408.076.007.889
5	2009	433.902.246.691
6	2010	457.257.012.732
7	2011	501.184.321.859
8	2012	563.696.948.271
9	2013	684.806.015.072
10	2014	906.667.815.660

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Barat 2015

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu 2005-2014 cenderung mengalami peningkatan hampir di setiap tahunnya, di mana pada tahun 2005 realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp.194.

982.015.432. Jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2007 menjadi Rp. 553.714.542.60. Peningkatan ini merupakan angka tertinggi di sepanjang tahun 2005-2014 yaitu sebesar 128 persen, namun jumlah ini turun pada tahun 2008 sebesar Rp. 408.076.007.889 atau turun 74,69 persen dari tahun 2007. Kemudian tahun berikutnya yakni tahun 2009 kembali meningkat sebesar Rp. 433.902.246.691, tanda-tanda kembali peningkatan terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 457.257.012.732 dan pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah kabupaten Aceh Barat tercatat Rp. 906.667.815.660. Tingginya pengeluaran pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat dan terjadinya penyerapan tenaga kerja yang selalu bertambah di setiap tahunnya. Karena masalah ketenagakerjaan masih menjadi salah satu masalah yang belum dapat diselesaikan, hal ini diakibatkan karena jumlah penduduk dan angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan yang tinggi tidak seimbang dengan lapangan kerja yang seimbang.

Semakin tingginya angkatan kerja tentu memerlukan lapangan pekerjaan yang layak, namun pada kenyataan lapangan pekerjaan tidak selalu tersedia. Semakin banyak penduduk, meningkatnya jumlah angkatan kerja, turut andilnya perempuan dalam dunia kerja menjadikan kesempatan kerja dan persaingan semakin ketat. Sumber daya yang baik, ketrampilan yang bagus menjadi modal bagi angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan orang yang tidak mampu bersaing dalam dunia kerja akan tersingkir dan menjadi pengangguran. Hal ini merupakan problema yang harus diselesaikan agar terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan tercapainya cita-cita pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, pertumbuhan ekonomi dapat juga di artikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang di wujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Tahap – Tahap Pertumbuhan Ekonomi

1. Masyarakat Tradisional (The Traditional Society)

Tahap tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang didalam fungsi produksi yang terbatas, dalam artian masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi yang relatif masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh pemikir yang tidak rasional, tetapi oleh kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus.

Tahap masyarakat tradisional (*the traditional society*), dengan karakteristiknya:

- Pertanian padat tenaga kerja;
- Belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi (era Newton);
- Ekonomi mata pencaharian;
- Hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan; dan
- Adanya sistem barter.

Menurut Rostow dalam masyarakat tradisional ini produksi perkapita masih sangat terbatas dan sumber daya produksi utama adalah sektor pertanian, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk mengadakan mobilitas vertikal dikarenakan kedudukan masyarakat tidak akan jauh berbeda dengan kedudukan ayahnya dan sistem mobilitasnya umumnya berdasarkan sistem warisan (pemeberian).

Dalam segi politik masyarakat tradisional umumnya tuan tanahlah yang memiliki otoritas tertinggi hal itu tidak lain karena pemilik tanah merupakan stratifikasi tertinggi dalam masyarakat tradisional. Kalau dilihat sistem ilmu pengetahuan dalam masyarakat ini cenderung menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang kurang rasional dan masih menggunakan cara berpikir budayawi dari tradisi turun temurun.

2. Prasyarat untuk Lepas Landas (*The Procondition for Take Off*)

Tahap prasyarat lepas landas ini adalah masa transisi dimana ketika suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya, atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Tahap prasyarat lepas landas ini dibagi menjadi dua tipe oleh Rostow, yang pertama adalah tahap yang dilakukan dengan mengubah masyarakat tradisional yang telah ada, sedangkan yang kedua adalah *brown free* yaitu Amerika, Kanada, Australia, Selandia baru, yang ke dua mereka tidak perlu merubah sistem tradisional dikarenakan masyarakat itu terdiri dari imigran-imigran yang diperlukan sebagai tahap masa prasyarat lepas landas. Tahap pembentukan prasyarat tinggal landas (*the preconditions for takeoff*), yang ditandai dengan:

a) *Berkurangnya Sikap Mental Tradisional*. Pada tahap ini sikap mental tradisional secara perlahan-lahan mulai berkurang. Proses ini biasanya diawali dengan munculnya kelompok elit baru yang mempunyai gagasan bahwa modernisasi ekonomi adalah sesuatu yang mungkin dan bahkan sangat didambakan. Kemajuan ekonomi merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan lain yang dianggap terbaik, misalnya kebanggaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu. Kelompok elit baru ini mau bekerja keras, meningkatkan tabungan dan mengambil resiko dalam mengejar keuntungan modernisasi.

Sebagian *anggota* masyarakat sudah mulai berpikir rasional menyusul semakin meluasnya pendidikan, sekurang-kurangnya bagi beberapa orang tertentu. Perkembangan sektor pendidikan ini adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan modern.

b) *Peningkatan Saving dan Investasi*. Pada periode ini bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan bermunculan seiring dengan meningkatnya saving dan investasi secara teratur dan mendasar hingga melampaui laju pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan sektor perbankan/ lembaga keuangan, saving, investasi dan pendapatan masyarakat saling menunjang. Perkembangan sektor perbankan/ lembaga keuangan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menabung dan memperoleh dana yang diperlukan untuk investasi sehingga memacu peningkatan saving, investasi dan pendapatan masyarakat..

Rostow menyarankan supaya investasi pemerintah diarahkan kepada perluasan *Social overhead capital* (prasarana produksi) terutama untuk membangun jaringan transportasi. Pengembangan jaringan transportasi ini sangat besar peranannya dalam memperluas pasar, menggarap sumber daya alam secara lebih produktif, dan untuk memungkinkan negara memerintah secara lebih

efektif. Kebijakan ini juga membantu terwujudnya stabilitas politik dan integrasi nasional, yang merupakan prasyarat pula bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

- c) *Pengenalan Teknologi Maju*. Berkurangnya sikap mental tradisional, kemudian dalam bidang pendidikan serta peningkatan saving dan investasi merangsang berkembangnya usaha-usaha untuk memperbaiki serta memperkembangkan lebih lanjut alat-alat dan metode produksi. Penyebaran teknologi maju ini diiringi oleh berbagai rupa kegiatan pelatihan atau training untuk menggunakannya. Akibatnya, bermunculanlah berbagai rupa lembaga-lembaga pendidikan nonformal/ kursus-kursus keterampilan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Adapun tujuannya adalah untuk mengenalkan teknologi baru kepada para pekerja melalui paket kegiatan pelatihan dan penataran. Dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan nonformal ini merupakan pelopor penyebaran teknologi maju ke dalam masyarakat.
- d) *Berkembangnya Semangat Kebangsaan*. Semangat kebangsaan yang biasanya muncul sebagai reaksi terhadap intervensi dan dominasi asing, berfungsi sebagai kekuatan potensial dalam melahirkan masa transisi tersebut.

Di Indonesia yang sejak awal abad 17 mulai dijajah oleh Belanda, pada abad ke 19 mulai muncul berbagai gerakan kebangsaan untuk menentang kekuasaan Belanda. Pada awal abad 20 gerakan kemerdekaan tersebut semakin terorganisir dan terarah dan semakin intensif masa penjajahan Jepang (1942-1945) berakhir. Cita-cita perjuangan kemerdekaan itu kemudian dirumuskan sedemikian rupa dengan tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

3. *Lepas Landas (The Take Off)*

Tahap ini merupakan tahap interval dimana tahap masyarakat tradisional dan tahap prasyarat untuk lepas landas telah dilewati. Pada periode ini beberapa penghalang pertumbuhan dihilangkan dan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi diperluas dan dikembangkan serta mendominasi masyarakat sehingga menyebabkan efektivitas investasi dan meningkatnya tabungan masyarakat

Menurut Rostow waktu yang diperlukan dalam periode ini berkisar antara 20 sampai dengan 30 tahun. Untuk take off suatu negara harus memenuhi tiga syarat (karakteristik) berikut.

- Investasi netto meningkat sekitar dua kali lipa hingga menjadi di atas 10 persen dari pendapatan nasional
- Berkembangnya satu atau beberapa sektor (industri) manufaktur penting dengan
- Hadirnya secara cepat suatu kerangka politik, sosial dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern dan menumbuhkan daya dorong kepada pertumbuhan

4. *Gerakan Kearah Kedewasaan (The Drive to Maturity)*

Pada masa ini masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian faktor produksi dan kekayaan alamnya. Periode ini memerlukan waktu sekitar 40 atau 50 tahun. Karakteristik periode ini adalah sebagai berikut:

- *Kematangan Teknologi*. Penggunaan ataupun pemakaian teknologi sudah menyebar di berbagai penjuru, dan teknologi sangat berpengaruh dalam berbagai kegiatan.
- *Perubahan Struktur dan Keahlian Tenaga Kerja*. Kemajuan teknologi menimbulkan perubahan yang berarti terhadap struktur ekonomi dan keahlian tenaga kerja. Peranan sektor industri meningkat, sementara peranan sektor pertanian berkurang. Tenaga kerja berubah menjadi

terdidik. Kemajuan dalam bidang pendidikan ini selanjutnya menyebabkan upah nyata pekerja meningkat dan mereka mengorganisasikan diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi lebih besar.

- Manajemen Usaha. Kepemimpinan dalam dunia usaha (perusahaan) mengalami perubahan, dimana peranan manajer semakin penting dan terpisah-pisah dari pemilik (the owner). Perubahan ini mendorong lahirnya para manajer profesional yang mempunyai kedudukan yang semakin penting. Watak para pengusaha (manajer) berubah dari pekerja keras dan kasar menjadi manajer yang halus dan sopan.
- Kejenuhan Masyarakat. Adanya gejala kebosanan masyarakat terhadap kemajuan yang diciptakan oleh industrialisasi, dan mulai ada kritik-kritik terhadap industrialisasi tersebut. Ada kecenderungan bahwa masyarakat selalu menginginkan sesuatu yang lebih baru, mendorong terjadinya perubahan lebih lanjut.

5. Tahap Konsumsi Tinggi (*The Age of High Massconsumption*)

Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi. Karakteristiknya sebagai berikut :

- Proporsi ketenagakerjaan yang tinggi di bidang jasa;
- Meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa;
- Peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran

Dalam tahap ini terdapat tiga tujuan utama masyarakat yang diperebutkan dalam memperoleh sumberdaya yang tersedia dan dukungan politik, yaitu:

- Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara keluar negeri dan kecenderungan ini berwujud penaklukan negara lain.
- Menciptakan welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk dengan cara melakukan pemerataan pendapatan.
- Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat diatas konsumsi keperluan utama yang sederhana seperti, makanan, pakaian, perumahan menjadi barang tahan lama dan mewah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang serba kekurangan modal. Disamping itu akses untuk mendapatkan bantuan modal ke perbankan juga lebih memihak kepada para pengusaha besar dibandingkan dengan pengusaha ekonomi lemah.

Di samping itu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional juga memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. ketidakpastian perekonomian dan perdagangan dunia yang semakin meningkat menyebabkan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum adalah:

- *Faktor produksi*, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada, dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semakin mahal

- *Faktor investasi*, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada dasar
- *Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran*, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah
- *Faktor kebijakan moneter dan inflasi*, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus antisipatif dan dapat diterima pasar
- *Faktor keuangan negara*, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah (tidak defisit)..

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2005-2014.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini diambil adalah persentase pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat tahun 2005-2014. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut maka sampel yang diambil adalah hanya sebagian dari pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat selama 10 tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

Model Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melihat seberapa besar perubahan yang terjadi pada variabel Y apabila nilai pada variabel X berubah. Penggunaan analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat dua variabel X dan satu variabel Y. Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penyerapan tenaga kerja (variable terikat)

A = Konstanta

b₁ = koefisien regresi faktor X₁

b₂ = koefisien regresi faktor X₂

X₁ = pertumbuhan ekonomi (variabel bebas pertama)

X₂ = pengeluaran pemerintah (variabel bebas kedua)

e = standar error term (factor pengganggu)

Analisis persamaan regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan program komputer

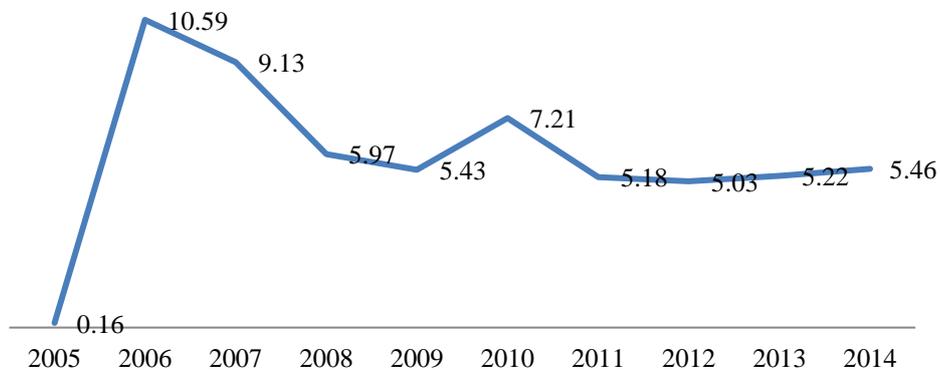
Statistica Product and Service Solution (SPSS) versi terbaru hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat dalam pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Perekonomian Kabupaten Aceh Barat

Searah dengan kebijakan pemerintah setelah mulai ditetapkannya otonomi daerah kabuupaten/kota sejak tahun 2001, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong pemerataan pembangunan, dan jugfa mempercepat pemulihan perekonomian. Perekonomian Kabupaten Aceh Barat terlihat meningkat setiap tahunnya dal ini terlihat pada grafik 1berikut:

Grafik 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2005-2014 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2015)

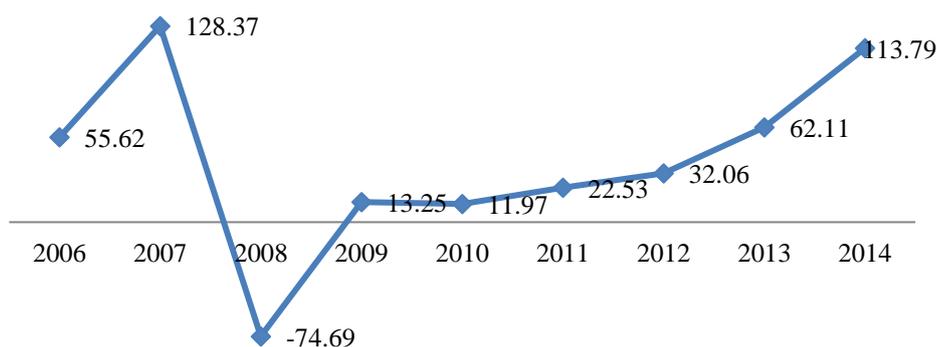
Dari grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi d Kabupaten Aceh Barat terjadi peningkatan hingga tahun 2014. Di mana pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat sebesar 0,16 persen. Angka ini merupakan angka terendah sepanjang tahun 2005-2014. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2005-2007 disebabkan oleh banyak faktor diantaranya oleh kondisi keamanan di Kabupaten Aceh Barat dan terjadinya bencana tsunami yang melanda kota Melaboh yang merupakan pusat kota Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat meningkat drastis sebesar 5,97 persen. Peningkatan ini terjadi akibat adanya perbaikan infrastruktur dan peningkatan teknologi di bidang pertanian serta adanya bantuan dari investor asing yang memberikan bantuan modal kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka membangun daerah-daerah yang terkena tsunami. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat terjadi fluktuasi pada setiap tahunnya di mana pada tahun 2010 sebesar 7,21 persen pertumbuhan ini menurun pada tahun 2011 menjadi 5,18 persen kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 5,03 persen. Tanda-tanda peningkatan kembali terjadi peningkatan di tahun 2013 dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan ini terus berlanjut dengan pertumbuhan yang stabil di tahun 2014 yaitu sebesar 5,46 persen. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak dalam menanggulangi keadaan darurat pasca musibah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Tingginya pengeluaran pemerintah dapat menggerakkan roda perekonomian daerah oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu memperhatikan jenis pengeluaran yang dilakukan oleh daerah. Pengeluaran pemerintah ini bisa berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Berikut disajikan pengeluaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2008-2014:

Grafik 2
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2015)

Berdasarkan grafik 2 di atas menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan pengeluaran pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12837 persen. Tingginya tingkat pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2007 disebabkan oleh rehabilitas kota Meulaboh pasca bencana tsunami dan berbagai pengeluaran lainnya seperti belanja pegawai dan pembelian asset daerah kemudian pada tahun 2008 pertumbuhan pengeluaran pemerintah turun drastis menjadi -7469 persen. Kemudian tahun berikutnya tumbuh sebesar 1325 persen. Pertumbuhan ini terjadi hingga tahun 2014 yaitu sebesar 113,79 persen. Tingginya tingkat pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah.

Hasil Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan didapati:

Tabel 3. Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.718	5297,087		10,795	,000
X1	428	588,524	0,176	0,729	,490
X2	2,64	0,000	0,774	3,201	,015

Sumber: Data diolah (Juli 2016)

Setelah melakukan perhitungan dengan regresi, dan menggunakan model yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 5.718 + 428X_1 + 2,639X_2$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai $a = 5.718$ menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak mengalami perubahan atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat sebesar 5.718 jiwa
- Nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (X_1) = 1%, akan menyebabkan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 428 jiwa dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah (X_2) = 2,639 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1%, akan menyebabkan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 2 jiwa dengan asumsi variabel lain konstan.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi **R adjusted** didapati sebesar 0,481 artinya bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat 48,1 persen dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dan sisanya sebesar 51,9 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat (tahun 2004- 2015) terjadi peningkatan hingga tahun 2014. Di mana pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat merupakan angka terendah sepanjang tahun 2005-2014. Rendahnya pertumbuhan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya oleh kondisi keamanan di Kabupaten Aceh Barat dan terjadinya bencana tsunami yang melanda kota Melaboh yang merupakan pusat kota Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat meningkat drastic. Peningkatan ini terjadi akibat adanya perbaikan infrastruktur dan peningkatan teknologi di bidang pertanian serta adanya bantuan dari investor asing yang memberikan bantuan modal kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka membangun daerah-daerah yang terkena tsunami. Untuk tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif
- Pertumbuhan pengeluaran pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat (tahun 2004- 2015) tertinggi terjadi pada tahun 2007 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 128,37 persen. Tingginya tingkat

pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2007 disebabkan oleh rehabilitasi kota Meulaboh pasca bencana tsunami dan berbagai pengeluaran lainnya seperti belanja pegawai dan pembelian asset daerah kemudian pada tahun 2008 pertumbuhan pengeluaran pemerintah turun drastis menjadi -74,69 persen. Kemudian tahun berikutnya tumbuh sebesar 13,25 persen. Pertumbuhan ini terjadi hingga tahun 2014 yaitu sebesar 113,79 persen. Tingginya tingkat pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah.

3. Berdasarkan perhitungan regresi didapati bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diajukan disini antara lain: diharapkan pemerintah daerah yang selama ini telah mengupayakan kinerja perekonomiannya untuk lebih mendorong dan memacu lagi pertumbuhan ekonomi khususnya di semua sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan dan perusahaan daerah. Dan pemerintah daerah juga perlu mengupayakan dalam mengatasi masalah pengupahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa mengorbankan kepentingan pengusaha. Dalam hal ini pengupahan tidak hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan upah minimum, namun juga dapat dilakukan berdasarkan produktivitas dan pekerja sehingga baik pengusaha maupun kaum buruh ataupun pekerja selanjutnya mendapatkan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto. (2003). *Analisis Transformasi Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1969-2001*. [Skripsi]. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. (2015). *Aceh Barat dalam Angka 2015*. BPS. Meulaboh Aceh Barat
- *Indikator Kesejahteraan Kabupaten Aceh Barat*.
BPS. Meulaboh Aceh Barat
- Basri Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Budiono (2003). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi-1. Yogyakarta: BPFE
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat. (2015). *Laporan Realisasi Anggaran Pendaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2014*. Meulaboh Aceh Barat: DPKKD
- Firdausi. (2012). *Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Barat*. [Tesis]. Banda Aceh: Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Hasan Iqbal. (2008). *Regresi dan Korelasi Linear Berganda*. Edisi-2. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Otaviana, Saputri. (2011). *Jurnal Penyerapan Tenaga Kerja*. Jakarta: Universitas Indonesia

Sukirno Sadono. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi-3 . Jakarta: Grafindo Persada

Todaro, M and Smith, S. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga

-----.(2013). *Hubungan Upah dengan Gaji dan Tenaga Kerja*. Edisi ke-3. Jakarta: Grafindo Persada

Yudhoyono. (2004). *Jurnal Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Infrastruktur di Indonesia*